

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengawasan Program CAP Jadi Krusial

Penataan kampung kumuh lewat program Community Action Plan dengan usulan anggaran Rp 24 miliar perlu diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Aspirasi warga juga perlu diutamakan.

JAKARTA, KOMPAS — Selain pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bisa turut mengaudit hasil kerja konsultan agar bekerja sesuai kerangka acuan kerja dalam program Community Action Plan (CAP).

”Potensi kongkalikong sangat besar karena anggaran besar. Bisa saja ada titipan-titipan penyedia jasa konsultan dan lainnya. Korupsi di Indonesia selama ini seperti itu,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020, biaya jasa konsultasi penataan kampung kumuh melalui program CAP Rp 24 miliar. Konsultan di RW diusulkan Rp 556 juta. Sebanyak 76 RW masuk program CAP 2020.

Berkaitan dengan itu, Agus menekankan pentingnya membuka akses pengelolaan anggaran kepada publik untuk menutup berbagai celah korupsi, seperti pengawasan di lapangan yang lemah, tidak tegas, dan tekanan dari pihak dengan jabatan lebih tinggi. Masyarakat harus aktif mengawasi penerapan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh menyampaikan, usulan anggaran CAP belum disetujui karena menunggu rencana detail dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI. Senin (11/11), DPRKP dijadwalkan mempresentasikan rencana detail program, tujuan, dan target penyelesaian tahun 2020 di hadapan Komisi D.

Dengan anggaran tenaga konsultan per RW Rp 556 juta, kata Nova, DKI harus memiliki target jelas. Jika angka dinilai terlalu tinggi, DPRD

berpeluang memangkasnya.

Sesuai Peraturan Gubernur No 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, total 445 RW kumuh di Jakarta yang diidentifikasi.

Tenaga ahli

Menurut Kepala DPRKP DKI Kelik Indriyanto, penataan RW kumuh perlu beberapa ahli karena kebutuhan setiap RW berbeda-beda. Tenaga ahli yang tepat dibantu *surveyor*, fasilitator, *drafter*, dan bagian pelaporan. ”Ada enam tenaga ahli di satu RW. Komponen biayanya (Rp 556 juta) tidak hanya untuk tenaga ahli. Ada pendukung dan lain-lain, tetapi sebagian besar biaya untuk tenaga ahli,” ujarnya.

Tenaga ahli itu adalah tenaga ahli planologi sekaligus pemimpin tim, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli sipil, tenaga ahli teknik lingkungan, tenaga ahli sosial, dan tenaga ahli ekonomi manajemen.

Biaya mengacu standar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Tenaga ahli planologi dibayar Rp 19.350.000 per bulan dan tenaga ahli lainnya Rp 15.150.000 per bulan. Tenaga ahli planologi bekerja empat bulan, sedangkan tenaga ahli lainnya tiga bulan.

Kelik menyebutkan, biaya konsultasi tak dihitung kelipatannya. Misalnya, untuk dua RW tidak dihitung Rp 1,11 miliar. Sebab, satu tim konsultan bisa menangani 1-3 RW kumuh dalam satu kelurahan. ”Hanya tambahan biaya untuk tenaga lain seperti *surveyor* dan biaya sosialisasi.”

Selain menghasilkan perencanaan, tim konsultan juga memberdayakan masyarakat berupa kolaborasi dengan warga setempat agar penataan sesuai kebutuhan warga.

Kriteria fisik dalam program ini mulai saluran air yang baik, jalan aspal/beton, pe-

nerangan jalan, hidran kering untuk kebakaran, penghijauan, mural, tangki septik, dan IPAL komunal. Juga pemenuhan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, olahraga, dan keluarga berencana. Pemprov menargetkan penataan 200 RW kumuh sampai 2022.

Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Pusat Yaya Mulyarso menjelaskan, kajian CAP menghasilkan dokumen perencanaan kampung kumuh yang dieksekusi pada tahun berikutnya dalam program Collaborative Implementation Plan.

Untuk Jakarta Pusat, CAP 2018 difokuskan di 3 RW. Pada 2019, hasil kajian 2018 itu sudah dikerjakan. Tahun 2019, ada 12 RW yang dikaji dan akan dieksekusi 2020. Pada 2020, ada 23 RW yang dikaji.

Utamakan komitmen

Eny Rochayati, perwakilan warga Kampung Marlina di RW 017 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, meminta komitmen Pemprov DKI dalam menata kampung dan melibatkan warga dalam perencanaan.

Eny yang juga Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, mengkritik konsultan CAP di Kampung Marlina yang kurang mendelegasikan gagasan warga untuk penataan kampung mereka. Tanpa diskusi yang cukup, konsultan menyodorkan rancangan yang tak mencerminkan keinginan warga sehingga pembahasan diulang dan rancangan direvisi.

Bontot (52), Ketua RW 001 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengatakan, meski melalui rapat antara warga dan konsultan, sebagian masalah di kampungnya belum kunjung berbuah solusi. Salah satunya, penyediaan tangki septik.

(HLN/BOW/JOG/DIV/DAN)